



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2300 K/80/MEM/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL NOMOR 2965 K/80/MEM/2011 TENTANG PENETAPAN  
DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH  
PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI,  
MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2012**

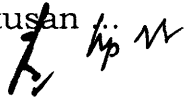
**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perkiraan penerimaan negara bukan pajak dari pendapatan sumber daya alam pertambangan umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangan umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2965 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);

4. Undang-Undang ...

*[Handwritten signature]*  
K. M.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5303);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 24 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

14. Keputusan 

14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2965 K/80/MEM/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0995 K/80/MEM/2012 tanggal 16 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

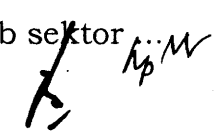
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2965 K/80/MEM/2011 TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, PERTAMBANGAN PANAS BUMI, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2012.

Pasal I

Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2965 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0995 K/80/MEM/2012 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangan umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi tahun 2012 untuk masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

- a. sub sektor pertambangan umum tahun 2012 sejumlah 1 (satu) provinsi, 258 (dua ratus lima puluh delapan) kabupaten, dan 19 (sembilan belas) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


b. sub sektor 

- b. sub sektor pertambangan panas bumi tahun 2012 sejumlah 4 (empat) kabupaten dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- c. sub sektor minyak bumi tahun 2012 sejumlah 6 (enam) provinsi, 55 (lima puluh lima) kabupaten, dan 6 (enam) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- d. sub sektor gas bumi tahun 2012 sejumlah 5 (lima) provinsi, 37 (tiga puluh tujuh) kabupaten, dan 7 (tujuh) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2012

  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,  
*Jeru Wacik*  
JERU WACIK

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
8. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
9. Para gubernur yang bersangkutan
10. Para bupati/walikota yang bersangkutan

*Handwritten marks/signatures in the bottom right corner.*

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 2300 K/80/MEM/2012  
 TANGGAL : 20 JULI 2012

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL  
 SUB SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2012

No.	Provinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Aceh</b>		<b>414.000.000</b>	<b>4.358.321.000</b>	<b>4.772.321.000</b>
1	Kab. Aceh Selatan	IUP	315.000.000	1.323.820.900	1.638.820.900
2	Kab. Aceh Barat	IUP, KK	-	882.542.720	882.542.720
3	Kab. Gayo Lues	IUP	-	939.386.800	939.386.800
4	Kab. Aceh Besar	IUP	42.000.000	160.003.400	202.003.400
5	Kab. Pidie	IUP, KK	-	163.760.600	163.760.600
6	Kota Subulussalam	IUP	-	48.378.600	48.378.600
7	Kab. Aceh Timur	IUP	15.000.000	775.000	15.775.000
8	Kab. Nagan Raya	IUP	-	541.523.500	541.523.500
9	Kab. Aceh Singkil	KK	-	52.280.880	52.280.880
10	Kab. Aceh Barat Daya	IUP	42.000.000	145.408.600	187.408.600
11	Kab. Aceh Tengah	IUP	-	37.200.000	37.200.000
12	Kab. Aceh Tamiang	IUP	-	32.240.000	32.240.000
13	Kab. Aceh Jaya	IUP	-	18.600.000	18.600.000
14	Kab. Pidie Jaya	IUP	-	6.200.000	6.200.000
15	Kab. Bireuen	IUP	-	6.200.000	6.200.000
<b>II</b>	<b>Sumatera Utara</b>		-	<b>3.953.392.000</b>	<b>3.953.392.000</b>
1	Kab. Mandailing Natal	IUP, KK	-	1.569.313.000	1.569.313.000
2	Kab. Tapanuli Utara	KK, IUP	-	1.612.000.000	1.612.000.000
3	Kota Padang Sidempuan	KK	-	248.000.000	248.000.000
4	Kab. Tapanuli Selatan	KK	-	124.000.000	124.000.000
5	Kab. Tapanuli Tengah	KK, IUP	-	37.200.000	37.200.000
6	Kab. Dairi	IUP, KK	-	163.215.000	163.215.000
7	Kab. Toba Samosir	IUP	-	98.828.000	98.828.000
8	Kab. Pakpak Bharat	IUP, KK	-	18.600.000	18.600.000
9	Kab. Karo	IUP	-	76.036.000	76.036.000
10	Kab. Humbang Hasundutan	IUP	-	6.200.000	6.200.000
<b>III</b>	<b>Sumatera Barat</b>		<b>28.741.624.000</b>	<b>3.008.515.000</b>	<b>31.750.139.000</b>
1	Kota Sawahlunto	IUP	17.250.000.000	558.997.000	17.808.997.000
2	Kab. Dharmasraya	IUP	8.220.037.000	228.387.000	8.448.424.000
3	Kab. Solok Selatan	IUP	200.000.000	404.123.000	604.123.000
4	Kab. Sijunjung	IUP	2.400.000.000	267.112.000	2.667.112.000
5	Kab. Lima Puluh Kota	IUP	239.680.000	99.720.000	339.400.000
6	Kab. Solok	IUP	410.000.000	175.386.000	585.386.000
7	Kab. Pesisir Selatan	IUP	15.523.000	734.128.000	749.651.000
8	Kab. Pasaman	IUP	-	482.107.000	482.107.000
9	Kab. Pasaman Barat	IUP	6.384.000	22.986.000	29.370.000
10	Kab. Agam	IUP	-	27.943.000	27.943.000
11	Kab. Tanah Datar	IUP	-	7.626.000	7.626.000
<b>IV</b>	<b>Riau</b>		<b>56.045.000.000</b>	<b>8.573.176.000</b>	<b>64.618.176.000</b>
1	Kab. Indragiri Hulu	IUP, PKP2B	49.200.000.000	6.630.728.000	55.830.728.000
2	Kab. Indragiri Hilir	IUP, PKP2B	4.500.000.000	937.037.000	5.437.037.000
3	Kab. Kuantan Singingi	IUP, PKP2B	2.345.000.000	426.254.000	2.771.254.000
4	Kab. Rokan Hulu	IUP	-	45.803.000	45.803.000
5	Kab. Kampar	IUP	-	313.543.000	313.543.000
6	Kab. Siak	IUP	-	77.577.000	77.577.000
7	Kab. Pelalawan	IUP, PKP2B	-	102.145.000	102.145.000
8	Kab. Kepulauan Meranti	IUP	-	40.089.000	40.089.000
<b>V</b>	<b>Kepulauan Riau</b>		<b>21.560.000.000</b>	<b>15.403.643.000</b>	<b>36.963.643.000</b>
1	Kab. Bintan	IUP	6.500.000.000	670.795.000	7.170.795.000
2	Kab. Karimun	IUP, KK	9.100.000.000	8.447.764.000	17.547.764.000
3	Kota Tanjung Pinang	IUP	1.200.000.000	887.124.000	2.087.124.000
4	Kab. Lingga	IUP	560.000.000	4.872.258.000	5.432.258.000
5	Pemprov. Kepulauan Riau	IUP	4.200.000.000	525.702.000	4.725.702.000

No.	Provinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>VI</b>	<b>Jambi</b>		<b>67.420.500.000</b>	<b>19.719.125.000</b>	<b>87.139.625.000</b>
1	Kab. Bungo	IUP, PKP2B	46.000.000.000	2.534.948.000	48.534.948.000
2	Kab. Batang Hari	IUP, PKP2B	8.400.000.000	3.310.959.000	11.710.959.000
3	Kab. Sarolangun	IUP, PKP2B	5.800.000.000	9.623.823.000	15.423.823.000
4	Kab. Merangin	IUP	4.600.000.000	944.018.000	5.544.018.000
5	Kab. Tebo	IUP	1.800.000.000	2.133.763.000	3.933.763.000
6	Kab. Muaro Jambi	IUP	600.000.000	1.155.618.000	1.755.618.000
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	IUP	220.500.000	15.996.000	236.496.000
<b>VII</b>	<b>Sumatera Selatan</b>		<b>564.325.000.000</b>	<b>66.854.772.000</b>	<b>631.179.772.000</b>
1	Kab. Muara Enim	IUP, PKP2B	340.000.000.000	26.850.365.000	366.850.365.000
2	Kab. Lahat	IUP, PKP2B	212.000.000.000	2.720.521.000	214.720.521.000
3	Kab. Musi Banyuasin	IUP, PKP2B	9.100.000.000	11.120.316.000	20.220.316.000
4	Kab. Banyuasin	IUP, PKP2B	3.200.000.000	4.682.805.000	7.882.805.000
5	Kab. Ogan Komering Ulu	IUP, PKP2B	25.000.000	7.898.898.000	7.923.898.000
6	Kab. Musi Rawas	IUP, KK, PKP2B	-	5.120.428.000	5.120.428.000
7	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	IUP	-	1.069.241.000	1.069.241.000
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	IUP, PKP2B	-	1.730.425.000	1.730.425.000
9	Kab. Ogan Ilir	IUP	-	877.377.000	877.377.000
10	Kab. Ogan Komering Ilir	IUP	-	1.930.589.000	1.930.589.000
11	Kota Prabumulih	IUP	-	1.790.621.000	1.790.621.000
12	Kab. Empat Lawang	IUP	-	1.063.186.000	1.063.186.000
<b>VIII</b>	<b>Kep. Bangka Belitung</b>		<b>414.000.000.000</b>	<b>47.670.926.000</b>	<b>461.670.926.000</b>
1	Kab. Bangka	IUP	152.500.000.000	17.954.030.000	170.454.030.000
2	Kab. Bangka Selatan	IUP, KK	89.000.000.000	8.300.016.000	97.300.016.000
3	Kab. Bangka Tengah	IUP, KK	62.000.000.000	3.812.980.000	65.812.980.000
4	Kab. Bangka Barat	IUP	42.000.000.000	10.211.349.000	52.211.349.000
5	Kab. Belitung Timur	IUP	35.000.000.000	5.791.332.000	40.791.332.000
6	Kab. Belitung	IUP	33.500.000.000	1.229.374.000	34.729.374.000
7	Kota Pangkal Pinang	IUP	-	371.845.000	371.845.000
<b>IX</b>	<b>Bengkulu</b>		<b>51.991.000.000</b>	<b>3.614.715.000</b>	<b>55.605.715.000</b>
1	Kab. Bengkulu Tengah	IUP	28.500.000.000	525.562.000	29.025.562.000
2	Kab. Bengkulu Utara	IUP	23.000.000.000	1.411.126.000	24.411.126.000
3	Kab. Seluma	IUP	171.000.000	352.999.000	523.999.000
4	Kab. Kaur	SIPP	320.000.000	307.593.000	627.593.000
5	Kab. Lebong	IUP	-	683.881.000	683.881.000
6	Kab. Bengkulu Selatan	SIPP	-	186.000.000	186.000.000
7	Kab. Muko Muko	IUP	-	117.794.000	117.794.000
8	Kab. Kepahiang	IUP	-	29.760.000	29.760.000
<b>X</b>	<b>Lampung</b>		<b>10.112.337.000</b>	<b>2.399.753.000</b>	<b>12.512.090.000</b>
1	Kab. Tanggamus	IUP, KK	10.106.209.000	1.513.402.000	11.619.611.000
2	Kab. Lampung Tengah	IUP	-	168.190.000	168.190.000
3	Kab. Pesawaran	IUP	6.128.000	160.766.000	166.894.000
4	Kab. Way Kanan	IUP, PKP2B	-	146.610.000	146.610.000
5	Kab. Mesuji	IUP	-	96.298.000	96.298.000
6	Kab. Lampung Barat	KK	-	20.000.000	20.000.000
7	Kab. Tulang Bawang	IUP	-	12.000.000	12.000.000
8	Kab. Pringsewu	IUP	-	282.487.000	282.487.000
<b>XI</b>	<b>Jawa Barat</b>		<b>36.172.200.000</b>	<b>4.655.599.000</b>	<b>40.827.799.000</b>
1	Kab. Bogor	IUP	35.800.000.000	642.500.000	36.442.500.000
2	Kab. Tasikmalaya	IUP	350.000.000	604.775.000	954.775.000
3	Kab. Sukabumi	IUP	11.200.000	1.877.751.000	1.888.951.000
4	Kab. Garut	IUP	6.000.000	1.017.245.000	1.023.245.000
5	Kab. Cianjur	IUP	5.000.000	211.823.000	216.823.000
6	Kab. Purwakarta	IUP	-	247.572.000	247.572.000
7	Kab. Ciamis	IUP	-	53.933.000	53.933.000
<b>XII</b>	<b>Banten</b>		<b>11.220.000.000</b>	<b>810.231.000</b>	<b>12.030.231.000</b>
1	Kab. Pandeglang	IUP	11.200.000.000	155.147.000	11.355.147.000
2	Kab. Lebak	IUP	20.000.000	655.084.000	675.084.000

No.	Provinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>XIII</b>	<b>Jawa Tengah</b>		<b>1.346.000.000</b>	<b>847.234.000</b>	<b>2.193.234.000</b>
1	Kab. Cilacap	IUP	1.200.000.000	71.776.000	1.271.776.000
2	Kab. Wonogiri	IUP	120.000.000	366.868.000	486.868.000
3	Kab. Banyumas	IUP	-	306.229.000	306.229.000
4	Kab. Pekalongan	IUP	-	43.539.000	43.539.000
5	Kab. Banjarnegara	IUP	-	38.347.000	38.347.000
6	Kab. Kebumen	IUP	-	10.400.000	10.400.000
7	Kab. Jepara	IUP	26.000.000	10.075.000	36.075.000
<b>XIV</b>	<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>			<b>149.356.000</b>	<b>149.356.000</b>
1	Kab. Kulon Progo	IUP	-	149.356.000	149.356.000
<b>XV</b>	<b>Jawa Timur</b>		<b>238.940.000</b>	<b>2.048.437.000</b>	<b>2.287.377.000</b>
1	Kab. Banyuwangi	IUP	38.000.000	776.486.000	814.486.000
2	Kab. Jombang	IUP	163.000.000	81.003.000	244.003.000
3	Kab. Lumajang	IUP	-	307.018.000	307.018.000
4	Kab. Pasuruan	IUP	-	23.560.000	23.560.000
5	Kab. Jember	IUP	12.000.000	2.430.000	14.430.000
6	Kab. Trenggalek	IUP	3.600.000	757.739.000	761.339.000
7	Kab. Pacitan	IUP	3.200.000	41.766.000	44.966.000
8	Kab. Blitar	IUP	-	6.820.000	6.820.000
9	Kota Mojokerto	IUP	3.540.000	6.820.000	10.360.000
10	Kab. Mojokerto	IUP	12.000.000	6.820.000	18.820.000
11	Kab. Madiun	IUP	-	15.500.000	15.500.000
12	Kab. Ponorogo	IUP	-	12.400.000	12.400.000
13	Kab. Tulungagung	IUP	3.600.000	10.075.000	13.675.000
<b>XVI</b>	<b>Kalimantan Barat</b>		<b>26.914.777.000</b>	<b>40.473.320.000</b>	<b>67.388.097.000</b>
1	Kab. Ketapang	IUP	25.190.773.000	21.790.752.000	46.981.525.000
2	Kab. Kapuas Hulu	IUP	-	2.252.925.000	2.252.925.000
3	Kab. Sanggau	IUP	1.313.769.000	8.892.847.000	10.206.616.000
4	Kab. Bengkayang	IUP	175.000.000	98.636.000	273.636.000
5	Kab. Landak	IUP	58.965.000	2.558.919.000	2.617.884.000
6	Kab. Sambas	IUP	175.000.000	62.250.000	237.250.000
7	Kab. Kubu Raya	IUP	-	1.693.241.000	1.693.241.000
8	Kab. Kayong Utara	IUP	-	1.216.779.000	1.216.779.000
9	Kab. Pontianak	IUP	-	1.409.567.000	1.409.567.000
10	Kab. Sintang	IUP, KK, PKP2B	-	359.376.000	359.376.000
11	Kab. Sekadau	IUP	395.000	78.850.000	79.245.000
12	Kab. Melawi	IUP	875.000	43.492.000	44.367.000
13	Kota Singkawang	IUP	-	15.686.000	15.686.000
<b>XVII</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>		<b>390.500.804.000</b>	<b>57.967.839.000</b>	<b>448.468.643.000</b>
1	Kab. Murung Raya	IUP, KK, PKP2B	247.875.847.000	12.499.397.000	260.375.244.000
2	Kab. Kapuas	IUP, KK, PKP2B	53.788.299.000	5.306.815.000	59.095.114.000
3	Kab. Barito Utara	IUP, PKP2B	33.959.102.000	17.579.834.000	51.538.936.000
4	Kab. Barito Selatan	IUP, PKP2B	27.806.920.000	7.386.811.000	35.193.731.000
5	Kab. Barito Timur	IUP, PKP2B	21.180.380.000	5.127.948.000	26.308.328.000
6	Kab. Lamandau	IUP	4.926.151.000	1.252.599.000	6.178.750.000
7	Kota Palangka Raya	IUP	55.800.000	41.600.000	97.400.000
8	Kab. Gunung Mas	IUP, KK	-	4.693.003.000	4.693.003.000
9	Kab. Katingan	IUP, KK	435.212.000	2.930.495.000	3.365.707.000
10	Kab. Kotawaringin Timur	IUP	325.769.000	814.107.000	1.139.876.000
11	Kab. Kotawaringin Barat	IUP, KK	147.324.000	27.760.000	175.084.000
12	Kab. Seruyan	IUP, KK	-	93.954.000	93.954.000
13	Kab. Sukamara	IUP	-	206.076.000	206.076.000
14	Kab. Pulang Pisau	IUP	-	7.440.000	7.440.000
<b>XVIII</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>		<b>2.801.973.687.000</b>	<b>38.363.235.000</b>	<b>2.840.336.922.000</b>
1	Kab. Balangan	IUP, PKP2B	600.000.000.000	769.085.000	600.769.085.000
2	Kab. Tabalong	IUP, PKP2B	500.000.000.000	1.558.258.000	501.558.258.000
3	Kab. Tanah Bumbu	IUP, KK, PKP2B	335.396.658.000	12.301.080.000	347.697.738.000
4	Kab. Tanah Laut	IUP, KK, PKP2B	467.972.191.000	3.362.270.000	471.334.461.000
5	Kab. Kotabaru	IUP, KK, PKP2B	176.687.277.000	7.135.661.000	183.822.938.000
6	Kab. Banjar	IUP, KK, PKP2B	406.728.032.000	2.937.538.000	409.665.570.000
7	Kab. Tapin	IUP, PKP2B	310.272.454.000	8.610.543.000	318.882.997.000
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	IUP, PKP2B	4.917.075.000	1.088.000.000	6.005.075.000
9	Kota Banjarbaru	KK, PIUP2B	-	374.000.000	374.000.000
10	Kab. Hulu Sungai Tengah	IUP, PKP2B	-	210.800.000	210.800.000
11	Kab. Barito Kuala	IUP	-	16.000.000	16.000.000


No.	Provinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>XIX</b>	<b>Kalimantan Timur</b>		<b>8.049.625.179.000</b>	<b>291.254.259.000</b>	<b>8.340.879.438.000</b>
1	Kab. Kutai Timur	IUP, PKP2B	3.607.982.600.000	31.244.335.000	3.639.226.935.000
2	Kab. Kutai Kertanegara	IUP, PKP2B	1.952.862.444.000	139.536.677.000	2.092.399.121.000
3	Kab. Berau	IUP, PKP2B	515.551.621.000	13.616.368.000	529.167.989.000
4	Kab. Kutai Barat	IUP, KK, PKP2B	895.730.915.000	53.387.499.000	949.118.414.000
5	Kab. Paser	IUP, PKP2B	656.119.226.000	16.707.230.000	672.826.456.000
6	Kab. Nunukan	IUP, PKP2B	123.343.735.000	2.003.257.000	125.346.992.000
7	Kota Samarinda	IUP, PKP2B	175.406.209.000	17.936.267.000	193.342.476.000
8	Kab. Malinau	IUP	53.626.969.000	5.804.041.000	59.431.010.000
9	Kab. Bulungan	IUP, PKP2B	31.264.395.000	7.342.733.000	38.607.128.000
10	Kab. Penajam Paser Utara	IUP	7.737.065.000	3.403.987.000	11.141.052.000
11	Kab. Tana Tidung	IUP, PKP2B	30.000.000.000	192.365.000	30.192.365.000
12	Kota Tarakan	IUP	-	62.000.000	62.000.000
13	Kota Bontang	PIUP2B	-	17.500.000	17.500.000
<b>XX</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>		<b>152.073.930.000</b>	<b>10.047.782.000</b>	<b>162.121.712.000</b>
1	Kab. Sumbawa Barat	IUP, KK	151.995.735.000	2.020.262.000	154.015.997.000
2	Kab. Sumbawa	IUP, KK	6.170.000	5.993.197.000	5.999.367.000
3	Kab. Bima	IUP, KK	72.025.000	1.180.695.000	1.252.720.000
4	Kab. Lombok Barat	IUP	-	517.472.000	517.472.000
5	Kab. Dompu	IUP, KK	-	313.836.000	313.836.000
6	Kab. Lombok Tengah	IUP	-	22.320.000	22.320.000
<b>XXI</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>		<b>384.051.000</b>	<b>2.135.588.000</b>	<b>2.519.639.000</b>
1	Kab. Timor Tengah Utara	IUP	285.142.000	28.033.000	313.175.000
2	Kab. Sumba Tengah	IUP	-	294.661.000	294.661.000
3	Kab. Belu	IUP	86.581.000	808.056.000	894.637.000
4	Kab. Manggarai Timur	IUP	8.531.500	71.331.000	79.862.500
5	Kab. Manggarai Barat	IUP	-	38.440.000	38.440.000
6	Kab. Manggarai	IUP	3.796.500	37.200.000	40.996.500
7	Kab. Rote Ndao	IUP	-	128.650.000	128.650.000
8	Kab. Ende	IUP	-	68.200.000	68.200.000
9	Kab. Timor Tengah Selatan	IUP	-	555.617.000	555.617.000
10	Kab. Kupang	IUP	-	93.000.000	93.000.000
11	Kab. Alor	IUP	-	12.400.000	12.400.000
<b>XXII</b>	<b>Sulawesi Utara</b>		<b>11.050.632.000</b>	<b>1.380.553.000</b>	<b>12.431.185.000</b>
1	Kab. Bolaang Mongondow Timur	IUP, KK	4.250.632.000	301.296.000	4.551.928.000
2	Kab. Minahasa Utara	IUP, KK	6.000.000.000	357.817.000	6.357.817.000
3	Kab. Minahasa Tenggara	KK	-	34.000.000	34.000.000
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	IUP, KK	-	107.306.000	107.306.000
5	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	IUP	-	228.127.000	228.127.000
6	Kab. Bolaang Mongondow	IUP, KK	-	122.605.000	122.605.000
7	Kab. Minahasa Selatan	IUP, KK	-	65.002.000	65.002.000
8	Kab. Kep. Sangihe	IUP	-	102.000.000	102.000.000
9	Kota Bitung	KK	800.000.000	62.000.000	862.000.000
10	Kota Manado	KK	-	400.000	400.000
<b>XXIII</b>	<b>Gorontalo</b>		<b>43.188.000</b>	<b>949.324.000</b>	<b>992.512.000</b>
1	Kab. Pahuwato	KK, IUP	43.188.000	200.000.000	243.188.000
2	Kab. Bone Bolango	IUP, KK	-	559.904.000	559.904.000
3	Kab. Gorontalo	IUP, KK	-	31.071.000	31.071.000
4	Kab. Gorontalo Utara	IUP	-	135.409.000	135.409.000
5	Kab. Boalemo	IUP	-	22.940.000	22.940.000
<b>XXIV</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>		<b>31.132.000.000</b>	<b>17.978.689.000</b>	<b>49.110.689.000</b>
1	Kab. Morowali	IUP, KK	31.132.000.000	8.982.715.000	40.114.715.000
2	Kab. Banggai	IUP	-	1.980.266.000	1.980.266.000
3	Kab. Toli-Toli	IUP, KK	-	2.337.286.000	2.337.286.000
4	Kab. Donggala	IUP, KK	-	1.892.651.000	1.892.651.000
5	Kab. Buol	IUP, KK	-	656.754.000	656.754.000
6	Kab. Parigi Moutong	IUP, KK	-	545.506.000	545.506.000
7	Kab. Poso	IUP	-	462.617.000	462.617.000
8	Kab. Tojo Una-Una	IUP	-	902.494.000	902.494.000
9	Kota Palu	KK	-	151.200.000	151.200.000
10	Kab. Sigi	IUP, KK	-	67.200.000	67.200.000



No.	Provinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>XXV</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>78.113.445.000</b>	<b>3.498.363.000</b>	<b>81.611.808.000</b>
1	Kab. Luwu Timur	IUP, KK	78.000.000.000	146.459.000	78.146.459.000
2	Kab. Luwu	IUP, KK	-	1.175.667.000	1.175.667.000
3	Kab. Luwu Utara	IUP, KK	-	788.095.000	788.095.000
4	Kab. Toraja Utara	IUP	80.000.000	49.945.000	129.945.000
5	Kab. Sidenreng Rappang	KK	-	266.600.000	266.600.000
6	Kab. Tana Toraja	IUP	-	161.006.000	161.006.000
7	Kab. Maros	IUP	20.000.000	52.083.000	72.083.000
8	Kota Palopo	IUP	-	347.200.000	347.200.000
9	Kab. Enrekang	IUP, KK	945.000	77.461.000	78.406.000
10	Kab. Barru	IUP	-	64.760.000	64.760.000
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	IUP	12.500.000	22.581.000	35.081.000
12	Kab. Bone	IUP	-	238.626.000	238.626.000
13	Kab. Takalar	IUP	-	38.440.000	38.440.000
14	Kab. Sinjai	IUP	-	34.720.000	34.720.000
15	Kab. Wajo	KK	-	24.800.000	24.800.000
16	Kab. Jeneponto	IUP	-	9.920.000	9.920.000
<b>XXVI</b>	<b>Sulawesi Barat</b>		-	<b>507.451.000</b>	<b>507.451.000</b>
1	Kab. Mamuju	IUP	-	474.151.000	474.151.000
2	Kab. Mamasa	IUP	-	21.300.000	21.300.000
3	Kab. Mamuju Utara	IUP	-	12.000.000	12.000.000
<b>XXVII</b>	<b>Sulawesi Tenggara</b>		<b>47.274.000.000</b>	<b>22.711.110.000</b>	<b>69.985.110.000</b>
1	Kab. Kolaka	IUP, KK	20.974.000.000	2.184.345.000	23.158.345.000
2	Kab. Konawe Utara	IUP	7.000.000.000	5.490.426.000	12.490.426.000
3	Kab. Bombana	IUP, KK	9.000.000.000	4.148.828.000	13.148.828.000
4	Kab. Konawe Selatan	IUP, KK	3.100.000.000	1.077.884.000	4.177.884.000
5	Kab. Kolaka Utara	IUP, KK	3.200.000.000	1.167.620.000	4.367.620.000
6	Kab. Buton	IUP	3.500.000.000	2.446.884.000	5.946.884.000
7	Kab. Konawe	IUP, KK	500.000.000	5.747.490.000	6.247.490.000
8	Kab. Buton Utara	IUP	-	112.880.000	112.880.000
9	Kota Bau-Bau	IUP	-	325.453.000	325.453.000
10	Kab. Muna	IUP	-	9.300.000	9.300.000
<b>XXVIII</b>	<b>Maluku</b>		<b>700.000.000</b>	<b>320.921.000</b>	<b>1.020.921.000</b>
1	Kab. Maluku Barat Daya	IUP	700.000.000	218.829.000	918.829.000
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	IUP	-	47.148.000	47.148.000
3	Kab. Seram Bagian Barat	IUP	-	20.570.000	20.570.000
4	Kab. Maluku Tengah	IUP	-	34.374.000	34.374.000
<b>XXIX</b>	<b>Maluku Utara</b>		<b>104.500.000.000</b>	<b>15.042.800.000</b>	<b>119.542.800.000</b>
1	Kab. Halmahera Timur	IUP	47.000.000.000	4.564.160.000	51.564.160.000
2	Kab. Halmahera Utara	IUP, KK	5.500.000.000	236.548.000	5.736.548.000
3	Kab. Halmahera Selatan	IUP	40.000.000.000	6.407.732.000	46.407.732.000
4	Kab. Kepulauan Sula	IUP	-	3.097.697.000	3.097.697.000
5	Kab. Halmahera Tengah	IUP, KK	12.000.000.000	253.160.000	12.253.160.000
6	Kab. Halmahera Barat	IUP	-	358.400.000	358.400.000
7	Kab. Kepulauan Morotai	IUP	-	30.480.000	30.480.000
8	Kota Tidore Kepulauan	IUP	-	94.623.000	94.623.000
<b>XXX</b>	<b>Papua</b>		<b>1.610.000.000.000</b>	<b>12.028.728.000</b>	<b>1.622.028.728.000</b>
1	Kab. Mimika	IUP, KK	1.610.000.000.000	1.150.000.000	1.611.150.000.000
2	Kab. Paniai	IUP, KK	-	452.142.000	452.142.000
3	Kab. Sarmi	IUP, KK	-	6.599.623.000	6.599.623.000
4	Kab. Nabire	IUP, KK	-	417.328.000	417.328.000
5	Kab. Keerom	IUP, KK	-	504.000.000	504.000.000
6	Kab. Puncak Jaya	KK	-	252.000.000	252.000.000
7	Kab. Tolikara	KK	-	441.000.000	441.000.000
8	Kab. Waropen	IUP, KK	-	298.200.000	298.200.000
9	Kab. Jayapura	IUP	-	260.400.000	260.400.000
10	Kab. Pegunungan Bintang	KK	-	858.228.000	858.228.000
11	Kab. Jayawijaya	IUP, KK	-	163.800.000	163.800.000
12	Kab. Mamberamo Raya	IUP	-	331.148.000	331.148.000
13	Kab. Kepulauan Yapen	IUP	-	75.600.000	75.600.000
14	Kab. Yahukimo	IUP	-	225.259.000	225.259.000

No.	Provinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>XXXI</b>	<b>Papua Barat</b>		<b>3.440.880.000</b>	<b>4.080.071.000</b>	<b>7.520.951.000</b>
1	Kab. Raja Ampat	IUP, KK	3.400.000.000	894.534.000	4.294.534.000
2	Kab. Kaimana	KK	-	672.000.000	672.000.000
3	Kab. Sorong Selatan	IUP	-	416.204.000	416.204.000
4	Kab. Teluk Bintuni	IUP	40.880.000	1.093.643.000	1.134.523.000
5	Kab. Sorong	IUP	-	335.797.000	335.797.000
6	Kab. Manokwari	IUP	-	71.400.000	71.400.000
7	Kab. Fak Fak	IUP	-	118.146.000	118.146.000
8	Kab. Tambrau	IUP	-	168.000.000	168.000.000
9	Kab. Maybrat	IUP	-	310.347.000	310.347.000
	<b>Jumlah</b>		<b>14.571.313.174.000</b>	<b>702.807.228.000</b>	<b>15.274.120.402.000</b>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
*Jero Wacik*

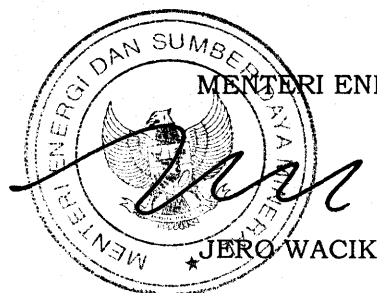
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2300 K/80/MEM/2012

TANGGAL : 20 JULI 2012

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN  
DAERAH PENGHASIL SUB SEKTOR PERTAMBANGAN PANAS BUMI  
UNTUK TAHUN 2012

No.	Area / Kabupaten	Pengembang	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Gunung Salak</b>	<b>Chevron Geothermal Salak, Ltd</b>	
1	Kabupaten Sukabumi		45,21
2	Kabupaten Bogor		54,79
<b>II.</b>	<b>Darajat</b>	<b>Chevron Geothermal Indonesia, Ltd</b>	
1	Kabupaten Garut		89,70
2	Kabupaten Bandung		10,30
<b>III.</b>	<b>Kamojang</b>	<b>PT Pertamina Geothermal Energi (PGE)</b>	
1	Kabupaten Bandung		87,06
2	Kabupaten Garut		12,94
<b>IV</b>	<b>Wayang Windu</b>		
1	Kabupaten Bandung	<b>Star Energy (Wayang Windu), Ltd.</b>	100,00



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Jero Wacik*

JERO WACIK

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


NOMOR : 2300 K/80/MEM/2012

TANGGAL : 20 JULI 2012

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL  
SUB SEKTOR MINYAK BUMI UNTUK TAHUN 2012

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>287.669,30</b>
<b>I</b>	<b>Aceh</b>		<b>2.209,17</b>
		1. Kab. Aceh Timur	21,08
		2. Kab. Aceh Utara	977,19
		3. Kab. Aceh Tamiang	1.210,90
<b>II.</b>	<b>Sumatera Utara</b>		<b>681,61</b>
		1. Kab. Langkat	255,11
		2. Kota Binjai	27,27
		3. Kab. Deli Serdang	0,29
		4. Kab. Padang Lawas	398,94
<b>III</b>	<b>Riau</b>		<b>140.845,59</b>
		1. Kab. Bengkalis	76.502,67
		2. Kab. Indragiri Hulu	708,51
		3. Kab. Kampar	15.541,89
		4. Kab. Rokan Hulu	798,60
		5. Kab. Rokan Hilir	19.747,36
		6. Kab. Siak	24.639,56
		7. Kab. Pelalawan	543,83
		8. Kab. Kep. Meranti	2.363,17
<b>IV</b>	<b>Kep. Riau</b>		<b>19.984,52</b>
		1. Kab. Natuna	12.989,94
		2. Kab. Kep. Anambas	6.994,58
<b>V</b>	<b>Jambi</b>		<b>10.326,20</b>
		1. Kab. Batang Hari	90,28
		2. Kab. Muaro Jambi	1.130,88
		3. Kota Jambi	583,39
		4. Kab. Tanjung Jabung Timur	1.668,26
		5. Kab. Tanjung Jabung Barat	4.992,97
		6. Kab. Sarolangun	1.494,42
		7. Kab. Tebo	366,00
<b>VI</b>	<b>Sumatera Selatan</b>		<b>29.085,94</b>
		1. Kab. Lahat	437,06
		2. Kab. Muara Enim	7.340,05
		3. Kota Prabumulih	632,51
		4. Kab. Musi Banyuasin	13.712,71
		5. Kab. Banyuasin	1.505,61
		6. Kab. Musi Rawas	2.838,79
		7. Kab. Ogan Ilir	581,01
		8. Kab. Ogan Komering Ulu	2.038,20
<b>VII</b>	<b>Lampung</b>	1. Kab. Lampung Timur	<b>2.781,54</b>
<b>VIII</b>	<b>DKI Jakarta</b>	1. DKI Jakarta	<b>3.103,23</b>

NO.	WILAYAH	MINYAK BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU BAREL)
1	2	3	4
<b>IX</b>	<b>Jawa Barat</b>		<b>6.328,86</b>
		1. Kab. Indramayu	1.392,30
		2. Kab. Karawang	1.021,93
		3. Kab. Majalengka	30,50
		4. Kab. Subang	128,91
		5. Kab. Bekasi	3.755,22
<b>X</b>	<b>Jawa Tengah</b>		<b>266,14</b>
		1. Kab. Blora	266,14
<b>XI</b>	<b>Jawa Timur</b>		<b>30.975,00</b>
		1. Kab. Bojonegoro	24.609,04
		2. Kab. Bangkalan	1.554,97
		3. Kab. Sumenep	243,77
		4. Kab. Tuban	731,47
		5. Kab. Gresik	3.835,75
<b>XII</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>		<b>1.742,09</b>
		1. Kab. Tabalong	1.693,80
		2. Kab. Balangan	48,29
<b>XIII</b>	<b>Kalimantan Timur</b>		<b>31.591,51</b>
		1. Kab. Bulungan	1.557,69
		2. Kab. Nunukan	646,41
		3. Kota Tarakan	1.337,43
		4. Kota Samarinda	237,83
		5. Kab. Kutai Kartanegara	24.867,72
		6. Kab. Kutai Timur	537,87
		7. Kab. Panajam Paser Utara	1.288,84
		8. Kota Bontang	1.084,92
		9. Kab. Tana Tidung	32,80
<b>XIV</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>	1. Kab. Morowali	<b>915,00</b>
<b>XV</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	1. Kab. Wajo	<b>0,37</b>
<b>XVI</b>	<b>Maluku</b>	1. Kab. Seram Bagian Timur	<b>1.134,60</b>
<b>XVII</b>	<b>Papua Barat</b>		<b>5.697,93</b>
		1. Kab. Teluk Bintuni	2.246,44
		2. Kab. Sorong	3.451,49
<b>B</b>	<b>Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)</b>	<b>Provinsi</b>	<b>34.469,66</b>
		1. Lampung	4.572,71
		2. Bangka Belitung	527,94
		3. Jawa Barat	5.646,12
		4. Kalimantan Timur	19.507,65
		5. Kep. Riau	1.019,68
		6. Jawa Timur	3.195,56
<b>C</b>	<b>Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>18.241,08</b>


  
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,  
*Jero Wacik*  
 JERO WACIK

hp

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2300 K/80/MEM/2012

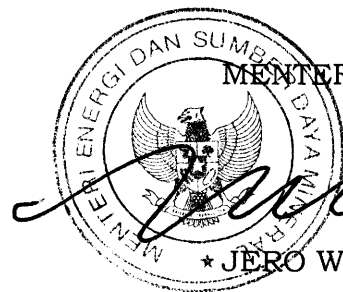
TANGGAL : 20 JULI 2012

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL  
SUB SEKTOR GAS BUMI UNTUK TAHUN 2012

NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MMBTU)
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Kabupaten/Kota atas pengelolaan di darat dan/atau laut (0 s.d. 4 Mil Laut)</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2.161.427,40</b>
<b>I</b>	<b>Aceh</b>		<b>21.979,89</b>
		1. Kab. Aceh Timur	1.830,00
		2. Kab. Aceh Utara	20.149,89
<b>II</b>	<b>Sumatera Utara</b>		<b>4.929,04</b>
		1. Kab. Langkat	4.503,01
		2. Kota Binjai	426,03
<b>III</b>	<b>Riau</b>		<b>11.712,00</b>
		1. Kota Pekanbaru	1.830,00
		2. Kab. Pelalawan	9.383,83
		3. Kab. Kep. Meranti	366,00
		4. Kab. Kampar	132,17
<b>IV</b>	<b>Kep. Riau</b>		<b>165.066,00</b>
		1. Kab. Natuna	107.292,90
		2. Kab. Kep. Anambas	57.773,10
<b>V</b>	<b>Jambi</b>		<b>54.443,77</b>
		1. Kab. Batang Hari	1.098,00
		2. Kab. Tanjung Jabung Timur	19.262,09
		3. Kab. Tanjung Jabung Barat	33.075,91
		4. Kab. Muaro Jambi	1.007,77
<b>VI</b>	<b>Sumatera Selatan</b>		<b>637.321,51</b>
		1. Kab. Lahat	16.021,77
		2. Kab. Muara Enim	46.103,03
		3. Kota Prabumulih	1.776,08
		4. Kab. Musi Banyuasin	394.128,99
		5. Kab. Musi Rawas	175.145,10
		6. Kab. Ogan Komering Ulu	4.146,54
<b>VII</b>	<b>DKI Jakarta</b>	1. DKI Jakarta	<b>12.810,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Jawa Barat</b>		<b>147.609,71</b>
		1. Kab. Indramayu	11.758,26
		2. Kab. Karawang	44.236,43
		3. Kab. Majalengka	873,41
		4. Kab. Subang	72.287,42
		5. Kab. Bekasi	18.454,19

hp

NO.	WILAYAH	GAS BUMI	
		DAERAH PENGHASIL	JUMLAH (RIBU MMBTU)
1	2	3	4
<b>IX</b>	<b>Jawa Timur</b>		<b>96.195,49</b>
		1. Kab. Sumenep	43.546,83
		2. Kab. Sidoarjo	4.758,00
		3. Kab. Gresik	34.744,17
		4. Kab. Bangkalan	2.075,52
		5. Kab. Bojonegoro	11.070,97
<b>X</b>	<b>Jawa Tengah</b>		<b>1.052,75</b>
		1. Kota Semarang	962,74
		2. Kab. Blora	90,01
<b>XI</b>	<b>Kalimantan Timur</b>		<b>619.981,24</b>
		1. Kota Tarakan	3.111,00
		2. Kota Samarinda	4.464,54
		3. Kab. Kutai Kartanegara	599.056,32
		4. Kab. Panajam Paser Utara	4.841,98
		5. Kota Bontang	4.851,02
		6. Kab. Nunukan	528,44
		7. Kab. Tana Tidung	3.127,94
<b>XII</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>		<b>7.320,00</b>
		1. Kab. Barito Utara	7.320,00
<b>XIII</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	1. Kab. Wajo	<b>22.692,00</b>
<b>XIV</b>	<b>Papua Barat</b>		<b>358.314,00</b>
		1. Kab. Sorong	732,00
		2. Kab. Teluk Bintuni	357.582,00
<b>B.</b>	<b>Provinsi atas pengelolaan di Laut (lebih dari 4 s.d. 12 Mil Laut)</b>	<b>Provinsi</b>	<b>588.888,75</b>
		1. Jawa Barat	43.171,55
		2. Kalimantan Timur	345.528,88
		3. Kep. Riau	87.474,00
		4. Jawa Timur	99.904,32
		5. Lampung	12.810,00
<b>C.</b>	<b>Pemerintah Pusat atas pengelolaan di Laut lebih dari 12 Mil Laut</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>146.573,85</b>



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

\* JERO WACIK